

PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG WALI *MUJBIR*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ISAORA ASTININGSIH

NPM: 1621010137

Jurusan: Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H /2020

PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG WALI *MUJBIR*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ISAORA ASTININGSIH

NPM: 1621010137

Jurusan: Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal Syakhshiyyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H /2020 M

ABSTRAK

Secara umum kerangka perwalian pernikahan berada dalam bingkai pemikiran bahwa penentuan calon pendamping baik istri maupun suami merupakan masalah yang paling serius bagi yang berhasrat ingin menikah. Proses ini hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena akan mempengaruhi secara langsung terhadap tujuan pencapaian perkawinan yang diidealkan. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Konteks saat ini wali *mujbir* sering disalah artikan sebagai landasan seorang wali memaksa anak perempuan nya yang masih gadis untuk menikah tanpa mempertimbangkan kemaslahatan anak gadis tersebut. Orang tua terutama Ayah sebagai wali *mujbir* tidak jarang memaksa anaknya untuk menikah dengan lelaki pilihannya. Pemaksaan kehendak tersebut karena Ayah maupun kakek merasa memiliki kedudukan sebagai wali yang merupakan salah satu dari rukun nikah. Wali *mujbir* yang sering diartikan dengan perkawinan paksa ulama terkemuka Indonesia yaitu Ibrahim Hosen memandang paksaan yang dimiliki oleh wali *mujbir* adalah dorongan kesantunannya. Hal ini dapat dikaji lagi supaya pengetahuan masyarakat tidak keliru mengenai hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir*. Berdasarkan pandangan Ibrahim Hosen tersebut maka perlu adanya analisis mengenai masalah tentang wali *mujbir*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pandangan Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir*. 2. Bagaimana metode *Istinbat* hukum Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir*, dan untuk mengetahui metode *Istinbat* hukum Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir*. Secara teoritis, signifikansi penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta pengembangan ilmu-ilmu hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan wali *mujbir*. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada pembaca mengenai pandangan Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini bersifat deskriptif analisis. dalam penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pandangan Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir* yakni mengartikan wali yang mempunyai hak menikahkan anak gadisnya yang masih perawan tanpa meminta izinnya terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat sesuai dengan fungsi ayah yang bertujuan baik untuk kemaslahatan anaknya. Jadi pemberian hak *ijbar* kepada ayah terhadap anak gadisnya, bukanlah berarti membenarkan perkawinan paksaan. *Istinbat* hukum Ibrahim Hosen dalam menetapkan hukum mengenai wali *mujbir* ialah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam memahami kedua hadis tersebut beliau menggunakan kaidah ushul fiqh dari aspek bahasa yaitu *mafhum mukhalafah* dan jenisnya *mafhum* sifat.

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmaanirrohiim

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isaora Astiningsih

NPM :1621010137

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Wali *Mujbir***” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2020

Penulis,

ISAORA ASTININGSIH
NPM. 1621010137



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Judul Skripsi : "PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG WALI MUJBIR"

Nama Mahasiswa : Isaora Astiningsih

NPM : 1621010137

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin., M.H.

NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Sucipto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196612271995031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG WALI MUJBIR"**, disusun oleh: **ISAORA ASTININGSIH, NPM: 1621010137.**

Fakultas: **Syari'ah**, Program Studi: **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada tanggal 26 Oktober 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.

(.....)

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.

(.....)

Penguji I : Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.

(.....)

Penguji III : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
KID 196210221993031002

MOTTO

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ
تُسْتَأْمَرُ وَأُذُنُهَا صَمَاتُهَا.¹ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “wanita janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan wanita gadis atau perawan perlu dimintai izinnya terlebih dahulu. Sedangkan izinnya ialah diamnya.”
(HR. Muslim).



¹ Imam Abu Husein Muslim, *Sahih Muslim Juz II*, Terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h.775

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil robbil 'aalamin, wabihi nasta'in wa'aala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'i mursalin, wa'alaa alaihi wasobbohi aj-mai'in, amma ba'du.

Sembah sujudku kepada Allah Swt, dan Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamah kelak aamiin aamiin ya robbal 'aalamin.

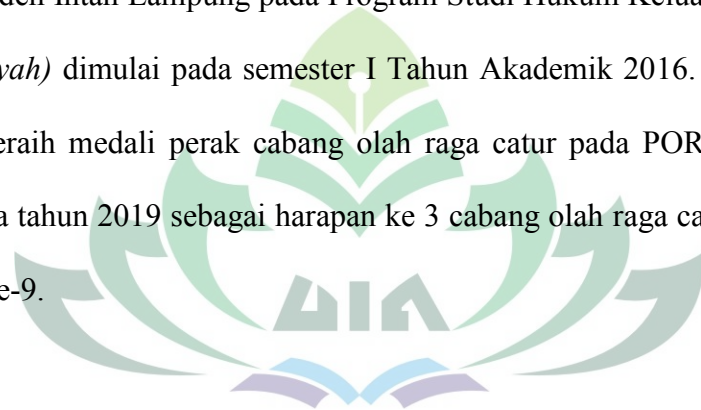
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karyaku ini sebagai bukti tanggung jawab dan sayangku kepada : Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Asmuni dan Ibu Minarsih yang telah membesarkanku, selalu mendoakan keberhasilanku dan menjadi panutan hidupku, Kakak-Kakak ku tersayang Daniel Krisdiyanto, S.P., dan Dani Susanto, S.E., atas dukungannya yang tiada henti, serta Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Isaura Astiningsih dilahirkan di Desa Sukabanjar Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 08 Juli 1998, merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Asmuni dan Ibu Minarsih.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 03 Sukabanjar dan selesai pada tahun 2010, SMP Negeri 02 Sidomulyo selesai pada tahun 2013, SMK Negeri 01 Kalianda selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016. Pada tahun 2017 sebagai peraih medali perak cabang olah raga catur pada PORPROV Lampung Ke-8, pada tahun 2019 sebagai harapan ke 3 cabang olah raga catur pada PIONIR Malang Ke-9.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala karunia, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG WALI MUJBIR**. Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarga, sahabat, dan umatnya, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamat kelak aamiin aamiin ya robbal'aalamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari pihak-pihak terkait, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

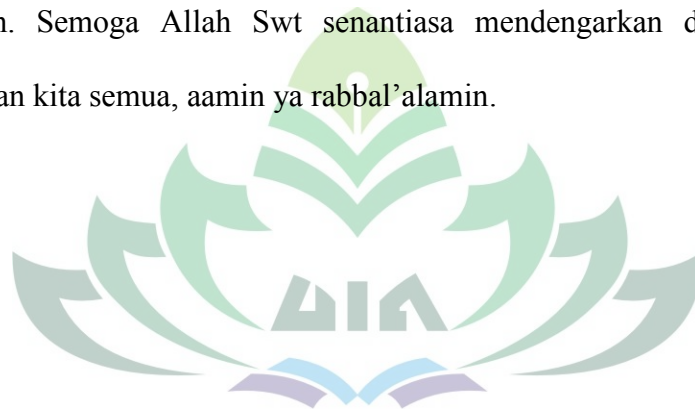
1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan sebagai pembimbing 1.
3. H. Rohmat, S.Ag, M.H.I, selaku ketua Jurusan *Ahwal Syahkshiyah* (Hukum Keluarga Islam).
4. Bapak Sucipto S.Ag, M.Ag. sebagai pembimbing II, dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai penguji I, Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. sebagai ketua sidang, Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. sebagai sekretaris sidang.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu pengetahuan serta ilmu agama selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Kedua orang tua (Bapak Asmuni dan Ibu Minarsih), dan kakak-kakak ku (Daniel Krisdiyanto, S.P., Dani Susanto, S.E., Septi Andriyani, S.Pd., Indarti) serta keluarga besar yang kucintai dan kubanggakan, sebagaimana telah memberikan segenap kasih sayang, mendidik, memberikan motivasi, dukungan dan tak henti-hentinya mendoakan penulis disetiap sujudnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat melalui studinya hingga saat ini.
8. Sahabat seperjuangan di kelas *Ahwal Syakhshiyah* (AS) C, Marisa Putri, Sulistia Reza, Indah Trisnawati, Betha Saputri, Fatimah Azzahroh, Resti Agustina, Putri Sanggita Padmayani, Jeny Priscilla dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Teman dekatku Wardani Saputra yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya.
10. Sahabat dekatku Sabilatul Asma Andani, yang selalu memberikan nasihatnya
11. Keluarga besar *Ahwal Syakhshiyah* (AS) dan rekan-rekan Jurusan *Muamalah, Siyasah* angkatan 2016.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya

skripsi ini, penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadah dari seluruh pihak diterima Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta memberikan setitik khazanah pengetahuan untuk terus memajukan dunia pendidikan. Semoga Allah Swt senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita semua, aamin ya rabbal'alam.



Bandar Lampung, 10 September 2020
Penulis,

Isaora Astiningsih
NPM.1621010137

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	11
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan Penelitian	12
G. Signifikansi penelitian.....	12
H. Metode Penelitian.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wali Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Wali.....	17
2. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan	19
3. Dasar Hukum Adanya Wali Dalam Perkawinan.....	21
4. Urutan Wali Nikah	26
5. Syarat-Syarat Wali Dalam Perkawinan.....	28

6. Macam-Macam Wali.....	29
B. Wali <i>Mujbir</i>	32
1. Pengertian Wali <i>Mubjir</i>	32
2. Pandangan Ulama Tentang Wali <i>Mujbir</i>	34
C. Tinjauan Pustaka	43

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Biografi Ibrahim Hosen.....	48
B. Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Wali <i>Mujbir</i>	57
C. <i>Istinbat</i> Hukum Ibrahim Hosen.....	62
1. Metode <i>Ijtihad</i> Ibrahim Hosen Dalam Memecahkan Permasalahan Hukum Islam	62
2. <i>Istinbat</i> Hukum Ibrahim Hosen Tentang Wali <i>Mujbir</i>	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Wali <i>Mujbir</i>	72
B. Analisis <i>Istinbat</i> Hukum Ibrahim Hosen Tentang Wali <i>Mujbir</i>	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah **“PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG WALI *MUJBIR*”**. Penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu diperjelas istilah dan ungkapan yang dianggap perlu, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Ibrahim Hosen, adalah pendapat yang dihasilkan dari buah pikiran Ibrahim Hosen untuk dianalisa dan dikembangkan lalu diambil suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. Ibrahim Hosen adalah ulama terkemuka Indonesia pendiri Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) dan Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang merupakan ahli fiqh dan usul fiqh.¹
2. Wali *Mujbir* adalah ayah atau kakek yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut.²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pandangan Ibrahim Hosen tentang Wali *Mujbir*, yakni mengkaji pandangan Ibrahim Hosen yang berkenaan dengan kewenangan wali *mujbir*.

¹Ahmad Rofi Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h.340.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.75

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif, permasalahan ini menarik untuk dikaji karena, pada konteks saat ini wali *mujbir* sering disalah artikan sebagai landasan seorang wali memaksa anak perempuannya yang masih gadis untuk menikah tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan diterima oleh anak gadis tersebut, bahwa seolah-olah di era sekarang ini orang tua menikahkan anaknya dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi Menurut Ibrahim Hosen sama sekali tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ibrahim Hosen memandang paksaan yang dimiliki oleh wali adalah dorongan kesantunannya. Hal ini dapat dikaji lagi supaya pengetahuan masyarakat tidak keliru mengenai hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir*. Berdasarkan pandangan Ibrahim Hosen tersebut maka perlu adanya analisis mengenai masalah tentang wali *mujbir*.
2. Secara Subjektif
 - a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di Jurusan Ahwal al-Syakhsyah yang meliputi hukum keluarga dimana Hukum Perkawinan Islam adalah bagian dari kajian perkuliahan.
 - b. Pembahasan mengenai Pandangan Ibrahim Hosen Tentang wali *mujbir* masih belum ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan ke dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, yang mana sebagai fitrahnya antara laki-laki dan perempuan ini hidup saling berpasang-pasangan. Mereka akan dianggap sah sebagai pasangan suami istri apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan suatu perkawinan yang kemudian mereka akan terikat dalam suatu hubungan perkawinan.

Istilah dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁴ Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁵

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat pertemuannya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 639.

⁴Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t), jilid 3, h. 109.

⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet. ke-3, h. 29.

mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.⁶

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan Islam berdasarkan wahyu Allah yakni Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagai firman-Nya dalam surat al-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".*⁷ (Q.S. al-Zariyat ayat 49)

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat

⁶ Nasrudin, Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), h. 1.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Keluarga* (Surabaya: Halim, 2013) h.522

dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan ini dinyatakan, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah.⁸

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.⁹

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."¹⁰ (Q.S. Surat al-Rum ayat 21)

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2015), h.14

⁹*ibid*, h.10.

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Keluarga* (Surabaya: Halim, 2013) h.406

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.¹¹

Meskipun tujuan perkawinan itu sangat mulia namun tidak selamanya perkawinan menjadi *masalah* bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini dengan mempertimbangkan beberapa alasan dilangsungkannya perkawinan dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya maka hukum melaksanakannya dibagi dalam beberapa macam, yakni:

Pertama, melakukan perkawinan yang hukumnya wajib. Bagi orang-orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

Kedua, melakukan perkawinan yang hukumnya sunah. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunah.

Ketiga, melakukan perkawinan yang hukumnya haram. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

¹¹ Amir Syarifudin, *ibid*, h. 47.

Keempat, melakukan perkawinan yang hukumnya makruh. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Kelima, melakukan perkawinan yang hukumnya mubah. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.¹²

Mengingat pernikahan itu memiliki tujuan dan konsekuensi hukum maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan sesuka hati, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Hal ini dikarenakan dalam pernikahan terdapat dua tujuan yang saling beriringan, yakni primer dan sekunder. Tujuan primer adalah hubungan seksual dan kemandirian bagi kedua mempelai. Sedangkan tujuan sekunder adalah kekerabatan dan kekeluargaan.

Dua tujuan di atas sering tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia. Tujuan sekunder lebih sering diutamakan daripada tujuan primer. Sehingga terdapat hak-hak yang tidak diperoleh kedua atau salah satu mempelai. Sebagai contoh adalah persetujuan gadis dalam memilih pasangan. Orang tua

¹² Abdul Rahman Ghazali, *ibid*, h.18-22.

terutama Ayah sebagai wali *mujbir* tidak jarang memaksa anaknya untuk menikah dengan lelaki pilihannya. Padahal yang akan menjalani kehidupan bersama lelaki itu adalah si gadis bukan sang Ayah.

Orang tua di dalam budaya Indonesia tentu memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan pilihan bagi anak-anaknya, mulai dari hal-hal yang sepele seperti memilih pakaian, sekolah, kuliah dan bahkan sampai urusan jodoh, tidak terlepas dari intervensinya. Selintas kecenderungan ini adalah hal yang wajar, sebab orang tualah yang mengikuti perjalanan kehidupan anak. Dengan alasan kasih sayang orang tua kepada anak, seringkali membawa kesimpulan bahwa apapun pilihan orang tua adalah yang terbaik bagi anak, seringkali tidak terlintas dibenak mereka apakah pilihan yang ditentukannya merupakan yang terbaik untuk anaknya. Padahal, kasus-kasus pernikahan dini juga tidak sedikit yang disebabkan karena hasil perijodohan. Sehingga tidak terlalu lama setelah akad nikah, pasangan nikah dini atau hasil perijodohan tersebut akhirnya mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pemaksaan kehendak tersebut karena Ayah maupun kakek merasa memiliki kedudukan sebagai wali yang merupakan salah satu dari rukun nikah. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:¹³

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan

¹³ Amir Syarifudin, *ibid*, h. 61.

4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁴

Dengan demikian, maka kebebasan penuh calon-calon mempelai satu pihak dan tanggung jawab orang tua di lain pihak dapat terpelihara baik dalam hubungan yang harmonis, sehingga merupakan satu kebebasan yang bertanggung jawab. Demikian juga kalau si calon isteri masih gadis, dipersoalkan, apakah pihak orang tua, c.q. bapaknya ke atas atau salah seorang walinya yang sah, mempunyai hak memaksa (ijbar) untuk mengikat perjanjian perkawinan.

Mengenai hal ini, pada umumnya para ahli fiqh berpendapat, bahwa tak seorangpun dapat memaksa seorang wanita dewasa dan waras untuk kawin tanpa persetujuannya. Satu-satunya pendapat yang berlainan adalah

¹⁴*Ibid*, h. 69.

Pendapat Mazhab Syafi'iyah yang membolehkan memaksa seorang wanita yang masih gadis untuk kawin, tetapi mayoritas ahli hukum Islam tidak setuju dengan beliau.¹⁵

Imam Abu Hanifah lebih prinsipiil dalam memegang teguh kebebasan penuh yang menjadi hak seseorang, baik laki-laki maupun wanita dalam memasuki perkawinan itu. Beliau berpendapat, bahwa tiada seorangpun dapat memaksakan seseorang wanita untuk menerima walinya sebagai pembantu dalam memilih seorang calon suaminya, asal saja ia sudah dewasa dan mempunyai akal yang waras serta berada dalam keadaan yang waras untuk melakukan pilihan yang tepat.¹⁶

Secara umum kerangka perwalian pernikahan berada dalam bingkai pemikiran bahwa penentuan calon pendamping baik istri maupun suami merupakan masalah yang paling serius bagi yang berhasrat ingin menikah. Proses ini hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena akan mempengaruhi secara langsung terhadap tujuan pencapaian perkawinan yang diidealkan.

Pada zaman modern saat ini banyak ditemui kasus di lapangan wali *mujbir* yang menikahkan anak gadisnya bukan lagi berdasarkan tanggung jawab untuk kemaslahatan anak gadisnya, tetapi karena kepentingan pribadi dari wali *mujbir* itu sendiri. Hal ini berbeda dengan tujuan baik ayah sebagai wali *mujbir* yang menikahkan anaknya karena ingin anaknya mendapatkan jodoh yang terbaik. Kenyataannya saat ini banyak ditemui kasus sang ayah

¹⁵ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987). h. 223.

¹⁶ *Ibid*, h. 224.

sebagai wali *mujbir* menikahkan anaknya secara paksa tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, karena tidak lagi mementingkan kebaikan untuk anak gadisnya hal ini tentu akan berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga sang anak. Karena ayah menikahkan anak gadisnya secara paksa bukan berdasarkan tanggung jawab tetapi hanya untuk mendapatkan kedudukan sosial di masyarakat bahkan ada yang menikahkan anak gadisnya sebagai pelunas hutang-hutang sang ayah, tentulah hal ini berbeda dengan wali *mujbir* yang telah ditetapkan oleh Syariat.

Dalam hal wali *mujbir* yang sering diartikan dengan perkawinan paksa ulama terkemuka Indonesia yaitu Ibrahim Hosen mengartikan bahwa perkawinan paksa dalam hal ayah yang menggunakan hak *ijbar* dengan sewenang wenang tidak dapat dibenarkan oleh agama dan oleh akal yang sehat.

Dari latar belakang persoalan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Wali *Mujbir*.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan masalah yang menjadi fokus penelitian atau fokus pembahasan dalam skripsi ini, guna mengefektifkan dan memudahkan pengolahan data, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini pada seputar pembahasan tentang tentang wali *mujbir* menurut pandangan Ibrahim Hosen.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir*?
2. Bagaimana metode *Istinbath* hukum Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir*?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir*.
2. Untuk mengetahui metode *Istinbath* hukum Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir*.

G. Signifikansi Penelitian

- a. Secara teoritis, signifikansi penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta pengembangan ilmu-ilmu hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan wali *mujbir*.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada pembaca mengenai pandangan Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir*.
- c. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada dipergustakaan, yang digali dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁸ Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.¹⁹ Dalam hal ini, penulis akan membahas permasalahan wali nikah secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai wali *mujbir*.

¹⁷Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h.114-117

¹⁸Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58

¹⁹Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 63

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah Al-Qur'an, Hadis, dan buku karya Ibrahim Hosen.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi, sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah data yang dapat memberikan data pendukung yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu data yang berasal dari sumber-sumber literatur atau data kepustakaan, peneliti melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di bahas, yaitu dengan cara membaca, memahami dan menyimpulkan dari berbagai buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁰

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: 1998),h.78.

Studi pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder tentang wali *mujbir*. Studi pustaka yang dilakukan peneliti juga akan membantu peneliti untuk menemukan pendapat para ahli dalam masalah ini.

4. Metode Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sesuai sesuai atau relevan dengan masalah.
- 2) Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya).
- 3) Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 4) Sistemetasidata (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²¹

Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis dengan bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang khusus.²²

Dalam penulisan skripsi, penulis menganalisa data-data yang diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada yaitu tentang wali *mujbir* dan dari data-data tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu tentang pandangan Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir*.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h.205

²² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.20

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wali Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wali

Secara etimologis, yang dimaksud dengan perwalian yaitu diartikan sebagai penguasaan dan perlindungan. Dalam terminologi fikih, perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹ Perwalian dalam perkawinan berarti pemberian kuasa kepada seseorang untuk menikahkan seorang perempuan. Orang yang diberi perwalian tersebut dinamakan wali.²

Secara umum yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 62.

² Sofyan, Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 100.

pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³

Wali dalam literatur fiqih Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Amin Suma wali disebut juga dengan *Al-Wilayah* atau *Al-Walayah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga diartikan kekuasaan atau otoritas. Sama seperti ungkapan *al-wali* yang berarti orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.⁴

Para ulama membagi *wilayah* dalam beberapa macam. Abu Hanifah membaginya dalam tiga bentuk. *Pertama*, kekuasaan atas individu (*wilayah 'ala al-nafs*), yaitu membimbing atau mengawasi anak-anak dalam urusan pernikahan, pendidikan, maupun kesehatan. Kekuasaan seperti ini dimiliki orang tua atau kakek. *Kedua*, kekuasaan atas harta (*wilayah 'ala al-mal*) dalam mengolah, mengatur dan mendistribusikan harta. Kekuasaan seperti ini bisa dimiliki orang tua, hakim, atau penerima wasiat (*washiyy*). *Ketiga*, kekuasaan atas harta dan individu (*wilayah 'ala al-mal wa al-nafs*). Kekuasaan seperti ini dimiliki orang tua atas anak-anaknya. Orang tua memiliki kekuasaan terhadap individu dan harta milik anak.⁵

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69.

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 134.

⁵ Roland Gunawan, Nur Hayati Aida. *Fikih Perwalian Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak* (Jakarta : Yayasan Rumah Kita Bersama, 2019), h. 334.

Menurut Abdullah Kelib, wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.⁶

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad perkawinan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad dalam perkawinan.⁷

2. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.⁸ Menurut Amir Syarifudin, wali dalam akad perkawinan itu sendiri dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁹

⁶ Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990), h. 11.

⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 102

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 64.

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 69

Kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan jumbuh ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya.¹⁰

Pentingnya wali bagi wanita dalam akad nikah, selain karena merupakan perintah agama juga disebabkan karena wanita adalah makhluk mulia, yang merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina suatu rumah tangga. Dari realita yang ada dalam masyarakat bahwa kedudukan dan tugas wali nikah adalah sangat penting artinya sekaligus mempunyai sifat menentukan didalam sah atau tidaknya suatu akad nikah.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR) dianggap memenuhi syarat.¹² Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan seorang wali dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang sangat penting.

¹⁰ Amir Syarifudin, h. 69

¹¹ Khoirul Abror, h.107

¹² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h. 222.

3. Dasar Hukum Adanya Wali dalam Perkawinan

Memang tidak ada ayat yang mengatur secara jelas yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an memberikan petunjuk *nash* yang tidak merujuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki ada-nya wali. Ayat dan hadis Nabi yang menjelaskan posisi wali antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Surat al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.”¹³(Q.S. al-Baqarah ayat 221).

Surat an-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 337.

Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁴(Q.S. an-Nur ayat 32).

Surat an-Nur ayat 32 menerangkan: Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin: Perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu *dan kawinkanlah* yakni bantulah agar dapat kawin *orang-orang yang sendirian diantara kamu*, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga *orang-orang yang layak* membina rumah tangga *dari hamba-hamba sahaya kamu laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan*. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena *jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui* segala sesuatu.¹⁵

Kata (الأيامى) *al-ayama* adalah bentuk jamak dari (أيم) *ayyim* yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Awalnya kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas sehingga mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda.¹⁶

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Indonesia* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 354

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 335

¹⁶ *Ibid.*, h. 335

Surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.¹⁷ (Q.S. al-Baqarah ayat 232).

Sebab turunnya ayat di atas dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Qasim Ma'qil bin Yasir. Ma'qil mempunyai seorang saudara perempuan yang dinikahi oleh Abibaddah. Kemudian ia diceraikan oleh suaminya itu. Setelah selesai iddah, Abibaddah merasa menyesal dan ingin kembali kepada bekas isterinya itu. Akan tetapi Ma'qil, sebagai wali, tidak menyetujuinya lagi sehingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian turunlah ayat di atas dan Ma'qil memperkenankan Abibaddah kembali kepada saudaranya.¹⁸

Larangan bagi wali menghalangi pernikahan perempuan yang berada dalam kewaliannya menunjukkan pentingnya adanya wali dalam sistem pernikahan Islam. Sebab jika wali tidak harus ada maka Al-Qur'an tidak perlu melarang wali menghalangi perkawinan orang-orang yang berada dalam kewaliannya, karena walaupun dia menghalangi nikah tetap

¹⁷ Departemen Agama RI, h. 37

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 388

bisa dilaksanakan. Analisis ini menunjukkan bahwa pernikahan bisa dilaksanakan tanpa wali tetapi tidak sah hukumnya.¹⁹

Nabi juga menjelaskan:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَانِكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. (رواه ابن ماجه)²⁰

Artiya: “Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Az-Zuhriy, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi Saw. dan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mereka berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak (sah) nikah, melainkan dengan wali. Dalam hadis Aisyah berbunyi: “hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.(HR. Ibnu Majah).

Q.S. an-Nisa (4) ayat 25:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut”.²¹ Q.S. An-Nisa (4) ayat 25.

¹⁹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 222

²⁰ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 624

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Indonesia* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 82

Q.S. al-Qashash (28) ayat 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".²²(Q.S. al-Qashash ayat 27)

Ayat di atas menerangkan bahwa ucapan sang ayah mengisyaratkan bolehnya menawarkan perkawinan anak wanita kepada seorang pria. Tentu saja setelah sang ayah memahami sikap putrinya kepada calon suami itu. Pada masa Nabi Muhammad Saw. pun, banyak orang tua yang menawarkan anaknya untuk dikawini. Salah satu yang paling populer adalah Umar Ibn al-Khatib yang menyodorkan anak perempuan beliau Hafshah untuk dikawini oleh Abu Bakar kemudian kepada Utsman. Tetapi keduanya tidak menyambut dan akhirnya dikawini oleh Rasulullah. Demikian, mereka tidak menganggap hal tersebut sebagai aib, bahkan ada wanita-wanita terhormat yang menawarkan dirinya untuk dikawini oleh Nabi Saw., walau beliau terdiam yakni tidak menyambutnya.²³

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Indonesia*, h. 388.

²³ M. Quraish Shihab, h. 335

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوسَى، عَزْلُوهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. (رواه ابن ماجه)²⁴

Artinya: “Abu Bakr bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Mu’adz menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhriy, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “perempuan mana saja, nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Dan kalau sudah terjadi percampuran, dan maharnya adalah bagi perempuan itu, oleh karena telah menggadakan percampuran. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan penjelasan di atas wali adalah rukun sah dalam pernikahan, ketika perempuan hendak menikah harus mempunyai wali. Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya. Jadi, perempuan membutuhkan wali dalam pernikahan, tanpa wali pernikahan tersebut tidak sah.

4. Urutan wali Nikah

a. Urutan Wali Nikah Menurut Mazhab Abu Hanifah

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki)
- 3) Ayah
- 4) Kakek dari pihak ayah

²⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 624

- 5) Saudara kandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak saudara laki-laki seayah
- 9) Paman (saudara ayah)
- 10) Anak paman²⁵

b. Urutan Wali Nikah Menurut Mazhab Maliki

- 1) Ayah
- 2) Anak laki-laki
- 3) Saudara laki-laki
- 4) Kakek
- 5) Paman (saudara ayah)
- 6) Hakim (perwalian beralih ke tangan hakim apabila semuanya itu tidak ada).²⁶

c. Urutan Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi'i

- 1) Ayah kandung, kemudian kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas.
- 2) Saudara sekandung, kemudian saudara seayah, kemudian kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah).
- 3) Paman (saudara ayah), kemudian saudara laki-laki sepupu (putra paman dari pihak ayah).²⁷

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta :Lentera, 2004), h. 347

²⁶ *Ibid.*,

d. Urutan Wali Nikah Menurut Mazhab Hambali

- 1) Ayah
- 2) Penerima wasiat dari ayah
- 3) Kerabat terdekat (mengikuti urutan yang ada dalam waris)
- 4) Hakim.²⁸

5. Syarat-Syarat Wali Dalam Perkawinan

Tidak semua orang dapat menjadi wali dalam perkawinan, kecuali mereka yang memenuhi syarat. Orang-orang yang berhak menjadi wali memiliki kewenangan yang tidak remeh. Maka seseorang berhak menjadi wali nikah bila dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁹

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- 2) Laki-laki muslim. Artinya tidak boleh perempuan menjadi wali. Muslim, yang dimaksud muslim yaitu tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- 3) Orang yang merdeka, yang dimaksud merdeka adalah tidak boleh seorang wali dari budak, sebab budak tidak memiliki kewenangan atas dirinya sendiri, maka ia pun tidak memiliki kewenangan atas diri orang lain.
- 4) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat

²⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), h. 65

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, h. 348

²⁹ Amir Syarifudin, h. 76.

hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

- 5) Berpikiran baik, artinya orang yang terganggu pikirannya karena ketuaan-nya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- 6) Adil, artinya tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.³⁰

6. Macam-Macam Wali

Secara garis besar wali nikah dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab berdasarkan urutan dari kekerabatan mempelai wanita dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

- 1) Kelompok pertama, yaitu kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, kelompok ini terdiri dari: ayah, kakek dari pihak ayah.
- 2) Kelompok kedua, yaitu kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.

³⁰ Amir Syarifudin, h. 78

- 3) Kelompok ketiga, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- 4) Kelompok keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.³¹

b. Wali Hakim

Dalam keadaan yang normal, wali nasab diutamakan terlebih dahulu untuk dapat mengawinkan putrinya, namun apabila wali nasab tidak mampu atau adanya sesuatu hal yang tidak mungkin wali nasab dapat mengawinkan putrinya, maka wali hakim dapat melangsungkan perkawinan.³²

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa, atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka di daerah tersebut atau orang-orang yang alim.³³

Adapun kewenangan untuk memindahkan kewenangan sebagai wali dari wali nasab ke wali hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila ada pertentangan di antara para wali

³¹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 45

³² *Ibid.*, h. 46.

³³ Slamet Abidin, Aminudin, Maman Abdul Djaliel, h. 92

- 2) Apabila wali nasab tidak ada, ada tetapi tidak mungkin untuk menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan untuk dihadirkan.³⁴

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a) Wanita yang belum baligh.
- b) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu.
- c) Tanpa seizin wanita yang akan menikah
- d) Di luar daerah kekuasaannya³⁵

Wali hakim diatur oleh hukum Islam adalah merupakan salah satu bentuk jalan keluar bagi pasangan yang telah saatnya untuk segera melangsungkan pernikahannya, namun wali yang menjadikan salah satu syarat ternyata tidak ada, atau ada namun tidak mungkin dapat melangsungkan pernikahannya, atau enggan untuk menikahkan, sebagai solusinya maka wali hakim dapat mengawinkan pasangan yang dapat kondisi demikian ini.³⁶

c. Wali *Tahkim*

Wali *tahkim*, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah: calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat, “*saya angkat bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si ... (calon istri) dengan mahar... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.*” Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama.

³⁴ Nasruddin, h. 46.

³⁵ Slamet Abidin, Aminudin, Maman Abdul Djaliel, h. 93

³⁶ Nasruddin, h.47.

Kemudian calon wali *tahkim* itu menjawab, “*saya terima tahkim ini.*”³⁷

Wali *tahkim* terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab gaib, atau bepergian jauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ.
- 3) Tidak ada *Qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).³⁸

d. Wali *Maula*

Wali *Maula*, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri yang menikahkan budaknya. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berbeda dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di sini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya, statusnya sebagai budak.³⁹

B. Wali *Mujbir*

1. Pengertian Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* adalah seorang wali yang mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya, yang berhak mengawinkan. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Ketidakhakusan meminta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu

³⁷ Slamet Abidin, Aminudin, Maman Abdul Djaliel, h. 93

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Slamet Abidin, Aminudin, Maman Abdul Djaliel, h. 93

adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.⁴⁰

Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti gila, anak kecil yang masih belum mencapai usia *tamyiz*, boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi sudah berusia *tamyiz* (abnormal).⁴¹ Termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis boleh dilakukan oleh wali *mujbir*.⁴²

Agama mengakui wali *mujbir* ini karena mengutamakan kepentingan yang diwalikan karena orang yang kehilangan kemampuan atau kurang kemampuannya tentu tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Di samping itu, ia belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Jadi, segala tindakan dan persoalan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang kurang akalnya itu harus dikembalikan kepada walinya. Jika orang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan akad nikah lalu melakukan akad nikah, hukumnya batal karena pernyataannya di dalam mengadakan akad dan segala tindakannya tidak dianggap sempurna sebab orang tersebut belum *tamyiz*.⁴³

⁴⁰ Amir Syarifuddin, 75.

⁴¹ Sayyid Sabiq, h. 18.

⁴² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 101

⁴³ Sayyid Sabiq, h. 18

Sifat-sifat *tamyiz* menjadi dasar penilaian hukum. Adapun jika orang yang kurang kemampuannya lalu melakukan akad nikah, hukumnya sah asalkan syarat-syaratnya yang lazim dapat dipenuhi dengan sempurna, di samping ada izin dari wali. Dalam hal ini, wali boleh mengizinkan atau menolak.⁴⁴

Dari penjelasan di atas adapun yang dimaksud dengan hak *ijbar* yang dimiliki wali *mujbir* adalah hak seorang ayah ke atas untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2. Pandangan Ulama Tentang Wali *Mujbir*

a. Pendapat Imam Abu Hanifah

Wali *mujbir* menurut Imam Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya.⁴⁵ Menurut Imam Hanafi wali *mujbir* berlaku bagi *ashabah* keturunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.⁴⁶ Tetapi hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir* tidak bisa digunakan secara mutlak, karena di dalam mazhab Hanafi ada obyek dari wali *mujbir* yaitu *al-Shaghira* (anak perempuan kecil), *'illat* (alasan) hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi bahwa *al-Shaghira* dinilai mempunyai sebuah kekurangan yaitu kurang adanya akal di dalam hal

⁴⁴ *Ibid*, h. 18

⁴⁵ Ali Usman, *Terjemahan Tabyinu al-Haqoiq*, Juz II, (Bandung: Daar Ilmiah, 1998), h. 122

⁴⁶ Sayyid Sabiq, h. 18

perkawinan, baik itu dalam pemilihan pasangan atau juga dalam hal aqad.⁴⁷

Hak wali *mujbir* terhadap anak perawan maupun janda menurut Abu Hanifah antara perawan dan janda manakala telah dewasa dan berakal serta merdeka, bukan budak berlaku baginya *wilayah istihbab* yaitu *wilayah* yang memberikan ruang bagi anak perempuan dewasa untuk melakukan urusannya sendiri tanpa bergantung kepada walinya.⁴⁸

Pendapat mazhab Hanafi disandarkan pada hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو السَّقَرِ يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ الْعَسْكَرِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُودِيُّ.
حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ جَارِيَةً
بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ.
فَخَيْرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه ابن ماجه)⁴⁹

“Artinya: Menceritakan kepada kami Abus-Saqr, yaitu Yahya bin Yazdad Al-Askariy, menceritakan kepada kami Al-Husain bin Muhammad Al-Marwarudziy, menceritakan kepada ku Jarir bin Hazim, Dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, bahwasanya seorang wanita perawan mendatangi Nabi Saw. lalu dia menuturkan kepada beliau bahwasanya ayahnya menjodohkannya sedangkan dia tidak senang. Kemudian Nabi Saw. menyuruhnya agar memilih” (HR. Ibnu Majah)

Menurut ulama Hanafiyah hadis di atas dengan jelas menunjukkan tidak bolehnya memaksa gadis dewasa yang berakal

⁴⁷ Sayyid Sabiq, h.124

⁴⁸ M. Husain az-Zahaby, *al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Kutb al-Haditsah, 1968), h. 117

⁴⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 619

untuk dinikahkan. Rasulullah Saw. sendiri, ketika ada seorang perempuan mendatangi beliau dan melaporkan perilaku ayahnya yang mengawinkannya padahal ia tidak senang, kemudian beliau memberinya hak memilih: memutuskan ikatan perkawinan itu atau melanjutkannya.⁵⁰

Golongan Hanafiyah berpendapat, wali *mujbir* adalah berlaku bagi ‘*ashabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya.⁵¹ Pendapat mazhab Hanafi menerangkan hak dari wali *mujbir* yaitu bisa menikahkan gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya, tetapi dalam hal ini tidak berlaku secara mutlak. Yang dimaksud dari kemutlakan tersebut yakni wali *mujbir* terkadang tidak bisa menggunakan hak *ijbar* nya, karena mazhab Hanafi mensyaratkan hak *ijbar* yang dimiliki wali *mujbir* tersebut adalah mampu menghadirkan calon suami yang *kafa'ah* dengan gadis, yang dimaksud *kafa'ah* di sini adalah mencakup lima hal yaitu sebagai berikut:⁵²

- 1) Nasab
- 2) Merdeka
- 3) Agama
- 4) Harta
- 5) Pekerjaan.

⁵⁰ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Juz 3), h. 1319

⁵¹ Abdul Rahman Ghozali, h. 63.

⁵² Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sarkh Fathul Al-Qadir, Juz III* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h.280-287.

Syarat yang diberikan mazhab Hanafi terhadap pemberlakuan hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir* yang dapat mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil dan baligh, apabila ternyata calon suami yang dihadirkan tidak *kafa'ah* dengan anak gadisnya, maka sigadis berhak menolak, tetapi bila tetap dilakukan aqad nikah maka pernikahan tersebut tidak sah.⁵³

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis di dalam Fatwa-nya yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi seperti berikut:

“sesungguhnya meminta izin (persetujuan) kepada gadis yang sudah dewasa adalah wajib bagi ayah atau lainnya, dan tidak boleh memaksanya untuk menikah. Pendapat inilah yang benar. Pendapat ini yang dipilih Imam Ahmad menurut satu riwayat dan dipilih oleh sebagian sahabatnya, dan ini juga merupakan mazhab Abu Hanifah.”⁵⁴

Syekhul Islam juga menulis di dalam Fatwa-nya yang kemudian dikutip oleh Yusuf Qardhawi:

“sesungguhnya menjadikan keperawanan sebagai alasan yang mewajibkan untuk membatasi hak (kaum wanita) adalah bertentangan dengan prinsip Islam, dan menjadikan hal tersebut sebagai ‘*illat* untuk membatasi atau menghalangi kaum wanita merupakan pembuatan ‘*illat* dengan suatu sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara.”⁵⁵

Fatwa Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi:

“yang benar, bahwa sebagai alasan *ijbar* (pemaksaan) itu ialah karena masih kecil, sedangkan gadis

⁵³ Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Raddul Al-Mukhtar ‘Ala Al-Dar Al-Mukhtar*, Juz IV (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), h. 206- h. 207.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 471

⁵⁵ *Ibid.*

yang sudah dewasa tentu tidak dapat dipaksa oleh seorang pun untuk menikah”.⁵⁶

Anggapan dijadikannya kondisi “masih kecil” sebagai alasan untuk membatasi kebebasan anak perempuan adalah berdasarkan *ijma*. Sedangkan menjadikan keperawanan sebagai alasan yang mengharuskan pembatasan itu bertentangan dengan prinsip Islam, karena Syar’i tidak menjadikan keperawanan sebagai pembatasan dalam suatu persoalan yang telah disepakati. Maka menjadikan hal itu sebagai alasan pembatasan merupakan pemberian alasan dengan sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara’.⁵⁷

b. Pendapat Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa ayah mempunyai hak *ijbar* terhadap anak gadis yang dewasa dan janda yang belum dewasa untuk dinikahkan apabila anak tersebut dipandang ayahnya belum atau tidak cerdas, ayahnya mempunyai hak *ijbar* untuk menikahkannya kepada calon suami yang walaupun calon suaminya tidak sekufu.⁵⁸

Perwalian *ijbar* menurut mazhab Maliki lahir akibat salah satu dari sebab ini, yaitu keperawanan dan masih kecil. Perwalian *ijbar* dilakukan terhadap perawan jika dia adalah seorang perempuan yang baligh, dan masih kecil jika dia adalah seorang janda, serta disunahkan

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, h. 471

⁵⁷ *Ibid.* h. 437

⁵⁸ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 206.

meminta izinnya.⁵⁹ Jadi, menurut pendapat Mazhab Maliki wali *mujbir* itu di tangan ayah dan pengasuh dan tidak boleh selain dari mereka.⁶⁰

c. Pendapat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perwalian *ijbar* adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya. Pada anak perawan yang telah berusia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling sahih.⁶¹

Pendapat Mazhab Syafi'i yang menyebabkan adanya hak *ijbar* ayah adalah keperawanan yang masih utuh dan bukan karena belum dewasa.⁶² Dalil yang digunakan dalam Mazhab Syafi'i yaitu hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَأُذْنُهَا صَمَاتُهَا. (رواه مسلم)⁶³

Artinya: *Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "wanita janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan wanita gadis atau perawan perlu dimintai izinnya terlebih dahulu. Sedangkan izinnya ialah diamnya."*(HR. Muslim).

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), h. 180

⁶⁰ Sayyid Sabiq, h.18.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9*, h. 181

⁶² Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) h. 206

⁶³ Imam Abu Husein Muslim, *Sahih Muslim Juz II*, Terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h.775

Hadis di atas menjadikan permintaan izinnya sebagai sesuatu yang sunah. Karena anak perawan sangat pemalu, manakala dia belum digauli oleh seorang laki-laki. Mazhab Syafi'i berpendapat petunjuk dalam hadis ini sangat jelas, bahwa wali boleh memaksa gadis dewasa untuk dinikahkan karena Rasulullah Saw. membedakan antara gadis dan janda, janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, yang menunjukkan bahwa gadis tidak lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dalam arti walinya lebih berhak atas dirinya daripada dirinya sendiri.⁶⁴

Dalil *qiyas* (analogi), menganalogikan antara gadis dewasa (*al-bikr al-balighah*) dan gadis di bawah umur (*al-bikr al-shaghirah*) dengan melihat persamaan keduanya yaitu “keperawanan” (*al-bikarah*) dan “ketiadaan pengalaman” (*‘adam al-tajribah*). Karena itu, kalau seorang ayah boleh memaksa anak gadisnya yang masih kecil, maka ia juga boleh memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa.⁶⁵

Ulama kalangan Syafi'iyah mengatakan berlaku syarat khusus bagi wali *mujbir* yang ingin menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, perempuan majnun, baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa, perempuan lajang yang dewasa dan berakal sehat, apabila tanpa disertai permintaan izin dan ridha darinya, yaitu:

⁶⁴ Ibrahim Hosen, h. 207.

⁶⁵ Roland Gunawan, Nur Hayati Aida. *Fikih Perwalian Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak*, h.257

- 1) Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan yang nyata
- 2) Dinikahkan dengan calon suami yang sekufu (setara, cocok, serasi)
- 3) Dinikahkan dengan mahar (maskawin) yang sesuai
- 4) Calon suami tidak sulit dalam memberikan mahar
- 5) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang menjadikannya menderita dalam pergaulannya, seperti dengan laki-laki tuna netra, tua renta, dan sebagainya.⁶⁶

Persyaratan pada poin ke dua yakni dinikahkan dengan calon suami yang sekufu, yaitu seorang wali *mujbir* mampu menghadirkan seorang calon suami bagi si gadis dengan kriteria sekufu, menurut Mazhab Syafi'i yang dimaksud sekufu yakni nasab, merdeka, agama, harta, pekerjaan, apabila seorang wali *mujbir* jika mampu menghadirkan calon suami dengan kriteria di atas, maka hak *ijbar* dari wali *mujbir* dapat diaplikasikan, yaitu dapat mengawinkan si gadis tanpa persetujuannya, tetapi sebaliknya apabila seorang wali *mujbir* tidak mampu untuk menghadirkan kriteria di atas, maka si gadis dapat menolak dan jika diteruskan maka *aqad - nya* tidak sah.⁶⁷

Meskipun Imam Syafi'i menetapkan empat hal yang harus ada dalam sebuah pernikahan yaitu wali, kerelaan mempelai perempuan, kerelaan mempelai laki-laki dan juga adanya dua saksi yang adil. Tetapi dalam hal anak perawan dan juga budak perempuan maka ayah

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 468.

⁶⁷ Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Raddul Al-Mukhtar 'Ala Al-Dar Al-Mukhtar*, h. 564

dapat menikahkan anak perempunnya tanpa izin dari anak tersebut. Begitu juga bagi tuan yakni boleh menikahkan budak perempuannya meski tanpa izin dari budak tersebut.⁶⁸

d. Pendapat Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali perwalian *ijbar* dimiliki oleh bapak, orang yang diwasiatkan, dan kemudian hakim. Hak perwalian tidak dimiliki oleh kakek dan semua wali. Hal ini diterapkan dalam kondisi menikahkan anak kecil perempuan saja. Izin perawan adalah diamnya dan izin janda adalah berupa ucapan. Dengan dalil hadis riwayat Abu Hurairah secara *marfu'*.⁶⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. (رواه البخاري)⁷⁰

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. berkata: “seorang wanita janda tidak boleh dikawinkan tanpa bermusyawarat terlebih dahulu dengannya. Seorang gadis perawan, tidak boleh dikawinkan sebelum minta izin kepadanya.” Para sahabat bertanya: “wahai rasulullah, bagaimana izin wanita gadis itu?” rasul menjawab: “kalau ia diam saja”.

⁶⁸ Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm Juz 6* (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, 2001), h. 471.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, h. 182

⁷⁰ Zainudin Hamidy, dkk. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Terjemahan Sahih Bukhari*, Jilid IV (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 12

C. Tinjauan Pustaka

Masalah tentang wali *mujbir* sudah dibahas oleh peneliti terdahulu dalam beberapa judul penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Metode *Istinbat* Hukum Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i Tentang Wali *Mujbir* (Suatu Pendekatan Komparatif)” karya ilmiah Habba Zuhaida, hasil penelitiannya adalah bahwa Perwalian *ijbar* menurut Imam Hanafi ialah perwalian kepada anak kecil atau wanita yang telah dewasa namun kurang akalnya (gila). Perwalian ini diadakan karena perempuan dalam keadaan yang demikian tidak mungkin untuk dapat melakukannya sendiri, dan untuk kemaslahatan bersama maka wali berhak untuk menikahkan wanita tersebut secara *ijbar* (tanpa persetujuannya). Kemudian perwalian *ijbar* menurut Imam Syafi’i yaitu hak wali yang dikhususkan oleh ayah atau kakek untuk menikahkan anak gadisnya baik kecil atau dewasa dengan tanpa persetujuan gadis tersebut. Adapun metode *istinbat* hukum wali *mujbir* yang digunakan Imam Hanafi adalah Al-Qur’an, Sunnah, dan ‘Urf. Imam Hanafi dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra’yi*. Kemudian metode *istinbat* hukum Imam Syafi’i terkait masalah wali *mujbir* ialah Alqur’an, Hadis, dan *qiyas*. Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *istinbat* hukum Imam Syafi’i dan Imam Hanafi mengenai wali *mujbir* di antaranya adalah adanya *ta’arud* dalam *qiyas*, perbedaan dalam pemahaman *dalalah lafaz*, adanya pemahaman ‘*illat* hukum yang berbeda, dan faktor sosial budaya. Kedua pendapat Imam Hanafi dan

Imam Syafi'i tentang wali *mujbir*, keduanya relevan untuk tetap digunakan dalam era sekarang, hanya melihat situasi dan kondisi dari wilayah tersebut. Peneliti (Habba Zuhaida) berpendapat bahwa, untuk di Indonesia pendapat Imam Syafi'i yang lebih relevan untuk digunakan.”⁷¹

2. Skripsi yang berjudul “Hak *Ijbar* Wali Dalam Hukum Perkawinan Studi Komperatif Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dan Yusuf Al-Qaradhawi” karya ilmiah Nopia Nurhasanah. Hasil penelitiannya menerangkan dalam kasus hak *ijbar* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah menyatakan bahwa tidak sah suatu pernikahan apabila tidak ada kerelaan dari kedua mempelai, untuk itu izin kedua mempelai sangat penting di sini. Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi hak *ijbar* masih ada bagi seorang wali namun hanya dikhususkan untuk anak perempuan yang belum pernah menikah dan masih kecil, bagi seorang perempuan yang sudah janda tidak ada hak *ijbar* untuk wali karena dia lebih memiliki hak untuk dirinya sendiri daripada walinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi mempunyai pemikiran yang sama dalam kasus hak *ijbar* wali untuk seorang janda, baik yang masih kecil maupun sudah dewasa. Menurut mereka wali tidak mempunyai hak *ijbar* untuk seorang perempuan yang sudah janda baik masih kecil maupun sudah dewasa karena seorang janda lebih memiliki hak atas dirinya sendiri dibandingkan dengan walinya. Namun mereka berselisih pendapat untuk seorang perempuan yang masih gadis, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tidak

⁷¹ Habba Zuhaida, *Studi Analisis Metode Istihsan Hukum Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Wali Mujbir (Suatu Pendekatan Komparatif)*, (Skripsi Prodi Ahwal Al-Shakhsyah UIN Wali Songo Semarang, 2016), h. 130-132.

ada hak *ijbar* bagi seorang gadis, pendapat beliau didasari oleh pemikirannya yang cenderung lebih memilih satu pendapat yang lebih baik tanpa melihat pendapat yang lain, sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang wali *mujbir* masih memiliki hak *ijbar* untuk anaknya yang masih gadis, Yusuf al-Qaradhawi memakai metode ijtihad *intiqā'i*. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sudah relevan dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pendapat Yusuf al-Qaradhawi masih belum relevan, walaupun sudah diketahui bahwa ada dispensasi nikah untuk anak yang masih di bawah umur, namun itupun harus atas kerelaan dari calon kedua mempelai.⁷²

3. Skripsi yang berjudul “Wali *Mujbir* (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i)” karya Mujahiddin Nur. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa konsep dari Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi terkait konsep wali *mujbir* dalam perkawinan sangat berbeda satu sama lain. Syafi’i berpendapat bahwa otoritas wali *mujbir* dalam perkawinan sangat menentukan, karena berdasarkan metode tafsir logika terbaliknya *Mahfum Mukhalafa* terhadap Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari Hadis yang melahirkan perbedaan persetujuan gadis dan janda. Kemudian cara menjaga anak gadisnya yang dianggap belum mengerti sama sekali tentang perkawinan dari kesalahan dalam memilih pasangan (*Dar’ul al-Mafsid*). Berbeda dengan Hanafi yang tidak membedakan status gadis dan janda, Hanafi berpendapat

⁷² Nopia Nurhasanah, *Hak Ijbar Wali Dalam Hukum Perkawinan Studi Komperatif Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dan Yusuf Al-Qaradhawi* (Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab IAIN Purwokerto, 2019), h. 81.

bahwa konsep wali *mujbir* tidak berlaku kecuali hanya pada anak gadis yang belum baligh dan pada gadis dewasa yang tidak waras atau gila, karena menurut Hanafi gadis dewasa dan janda adalah sama, yakni sama-sama cukup mampu berpikir dan memilih jalan hidup yang akan dipilih (*al-baligh al-aqilah*). Malah dikhawatirkan kalau adanya paksaan dari wali *mujbir* akan terjadi kerusakan pada perkawinannya kelak. Relevansi konsep wali *mujbir* dengan konteks pernikahan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi kaum perempuan, karena dalam perdebatannya, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memfokuskan pembahasan mereka pada paksaan perkawinan terhadap calon mempelai perempuan. Sedangkan dalam pasal 6 (1) bab II Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, mengindikasikan bahwa kedua calon mempelai harus diposisikan sebagai subyek perkawinan. Hal ini sangat cocok dengan pendapat Hanafi yang membebaskan perempuan dalam memilih pasangannya. Berbeda dengan pendapat Syafi'i yang menjadikan perempuan sebagai obyek perkawinan dalam konsep wali *mujbir*. Demi menjaga Hak Asasi kaum perempuan, konsep ini kurang patut digunakan. Meski pada kenyataannya masih banyak praktik konsep wali *mujbir* di Indonesia mengingat Mazhab Syafi'i adalah Mazhab yang paling diikuti di Indonesia. Tetap saja hal ini

bertolak belakang dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) bab II.⁷³

Dari ketiga judul di atas tidak terdapat pembahasan tentang pendapat Ibrahim Hosen tentang wali *mujbir*. Oleh sebab itu, penelitian yang berjudul “Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Wali *Mujbir*” perlu untuk diteliti lebih dalam oleh penulis karena sebelumnya belum pernah dibahas oleh peneliti manapun.



⁷³ Mujahiddin Nur, *Wali Mujbir Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i* (Skripsi Prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 63-64.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2015)
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy-Syifa, 1992)
- Ahmad Rofi Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Ali Usman, *Terjemahan Tabyinu al-Haqoiq*, Juz II, (Bandung: Daar Ilmiah, 1998)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987)
- Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Indonesia* (Bandung: Diponegoro, 2010)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Habba Zuhaida, *Studi Analisis Metode Istihsan Hukum Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Wali Mujbir (Suatu Pendekatan Komparatif)*, (Skripsi Prodi Ahwal Al-Shakhsiyyah UIN Wali Songo Semarang, 2016)
- Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah Thalaq Rudjuk dan Hukum Kewarisan* (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971)
- Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)

- Imam Abu Husein Muslim, *Sahih Muslim Juz II*, Terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy-Syifa, 1993)
- Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Sahih Bukhari Juz VII*, Terj. Achmad Sunarto dkk (Semarang: Cv. A.sy Syifa, 1993)
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005)
- Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sarkh Fathul Al-Qadir, Juz III* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmi, 1995)
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: 1998)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Keluarga* (Surabaya: Halim, 2013)
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007)
- M. Abdul Mujieb, Maabruri Tholhah, Syafi'ah A.M, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)
- M. Husain az-Zahaby, *al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Kutb al-Haditsah, 1968)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996)
- Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Raddul Al-Mukhtar ‘Ala Al-Dar Al-Mukhtar*, Juz IV (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.)

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002)

Muhammad Bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm Juz 6* (Beirut: Dar Ihya’ Al-Turats Al-‘Arabi, 2001)

Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t), jilid 3

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta :Lentera, 2004)

Mujahiddin Nur, *Wali Mujbir Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i* (Skripsi Prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2017)

Nopia Nurhasanah, *Hak Ijbar Wali Dalam Hukum Perkawinan Studi Komperatif Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dan Yusuf Al-Qaradhawi* (Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab IAIN Purwokerto, 2019)

Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990)

Roland Gunawan, Nur Hayati Aida. *Fikih Perwalian Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak* (Jakarta : Yayasan Rumah Kita Bersama, 2019)

Sofyan, Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet. ke-3

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018)

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

Zainudin Hamidy, dkk. *Li-~~Li~~XXVIII Terjemahan Sahih Bukhari*, Jilid IV (Jakarta: Widjaya, 1992)

Sumber On-Line:

Ibrahim Hosen, Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam, dalam Muhammad Wahyuni Nafis et, al., Kontekstualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: IPHI Paramadina, 1995), Cet. ke-1, h. 267. dikutip oleh Muhammad Farizi Farkhan, Yusdani. Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen, (On-line) tersedia di: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17014/08.%20naskah%20publikasi%20.pdf?sequence=12&isAllowed>. Di akses pada tanggal 1 mei 2020, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kodifikasi Karya Prof. KH. Ibrahim Hosen LML, (online) tersedia di: <https://www.iiq.ac.id/artikel/details/523/Kodifikasi-Karya-Prof-Dr-KH-Ibrahim-Hossen-LML>. Diakses pada tanggal 5 April 2020, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Muhammad Farizi Farkhan, Yusdani. Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen (On-line) tersedia di: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17014/08.%20naskah%20publikasi%20.pdf?sequence=12&isAllowed>. Di akses pada tanggal 1 Mei 2020, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

